

## PENGETAHUAN MAHASISWA PG-PAUD UNIPA SURABAYA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF

**Muchamad Irvan**

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

[irvan.mch15@gmail.com](mailto:irvan.mch15@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai wujud besarnya perhatian pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 tentang pendidikan inklusif. Permendiknas No.70 tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di wilayah masing-masing. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak serta merta karena kebijakan penyelenggaraan pemerintah, akan tetapi juga karena pengetahuan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah, baik warga sekolah, masyarakat, maupun mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik. Dalam hal ini, mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan yang notabene sebagai calon tenaga pendidik baik dalam lingkup sekolah dasar maupun sekolah menengah, dituntut untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan secara khusus tentang pendidikan inklusif demi berperan serta mensukseskan penyelenggaraan sekolah inklusi di setiap daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan yang dimiliki mahasiswa tentang pendidikan inklusif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 38 mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya. Proses pengumpulan informasi ialah dengan teknik angket terbuka. Adapun analisis data penelitian menggunakan teknik uji tanda. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif dan data kuantitatif dianalisis dengan rumus statistik sederhana. Pemaparan hasil analisis data menunjukkan rata-rata prosentase yang rendah yaitu 9,6%. Berdasarkan nilai persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya tentang pendidikan inklusif masih sangat rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan wawasan mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** *mahasiswa, pendidikan inklusif.*

### PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan cara

mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon keanekaragaman peserta didik yang

memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut. Pendidikan inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Salah satunya pengertian dari Nasichin (2001) yang menjelaskan Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama – sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum , dan pada akhirnya mereka bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Pada prinsipnya sekolah inklusi menyertakan seluruh anak-anak untuk dapat belajar bersama, meski beberapa kesulitan atau perbedaan-perbedaan yang mungkin mereka miliki. Sekolah inklusi harus mengetahui dan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan murid/siswa yang sangat bervariasi, mengakomodasi keduanya baik gaya maupun tingkat belajar yang berbeda dan memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua melalui kurikulum yang tepat, penyusunan keorganisasian, strategi-strategi mengajar, penggunaan sumber daya dan rekan kerja dengan komunitas mereka (UNESCO dalam Berhanu : 2011).

Pada tahun 2005 Indonesia mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif, dan pada akhir tahun 2008 Indonesia tercatat memiliki 814

sekolah inklusif yang melayani sekitar 15.181 anak berkebutuhan khusus (PKLK, 2011). Sebagai wujud besarnya perhatian pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 tentang pendidikan inklusif. Permendiknas No.70 tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di wilayah masing-masing. Pada tahun 2013 tercatat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki perkembangan pesat dalam implementasi pendidikan inklusif, dimana Surabaya dan Jember sebagai kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan sekolah inklusi terbanyak, hingga kemudian disusul oleh kabupaten kabupaten disekitar yang mulai mengimplementasikan antara lain Sidoarjo, Malang, Gresik, Mojokerto. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten kabupaten tersebut diawali dengan fokus penerapan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar yang kemudian dilanjutkan merambah pada penyelenggaraan di SMP, SMA dan SMK.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak serta merta karena kebijakan penyelenggaraan

pemerintah, akan tetapi juga karena pengetahuan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah, baik warga sekolah, masyarakat, maupun mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik. Dalam hal ini, mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan yang notabene sebagai calon tenaga pendidik baik dalam lingkup sekolah dasar maupun sekolah menengah, dituntut untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan secara khusus tentang pendidikan inklusif demi berperan serta mensukseskan penyelenggaraan sekolah inklusi di setiap daerah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan mahasiswa PG-PAUD Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Penelitian ini dianggap perlu dilakukan demi mendapatkan suatu informasi atau gambaran tentang pengetahuan mahasiswa yang notabene merupakan calon tenaga pendidik di sekolah inklusi.

#### **METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah tentang persepsi secara umum. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi

sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa PG-PAUD FKIP UNIPA Surabaya sejumlah 38 mahasiswa. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa PG-PAUD tentang Pendidikan Inklusif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis angket terbuka, yaitu angket yang memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

#### **HASIL PENELITIAN**

Dalam kegiatan penelitian, angket yang terdiri dari 10 pertanyaan diberikan pada seluruh mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya. Pertanyaan dari angket tersebut merupakan keilmuan dasar tentang pendidikan inklusif yang diambil dari buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (PKLK : 2011). Adapun hasil analisis angket adalah sebagai berikut:

1. *Apa yang anda ketahui tentang Sekolah Inklusif ?*

7,8% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah "sekolah inklusi

- merupakan sekolah yang diselenggarakan untuk anak normal dan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama”.
2. *Siapa peserta didik di Sekolah Inklusi ?*  
18,4% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “siswa normal dan siswa ABK”.
  3. *Siapa yang menjadi tenaga pendidik di Sekolah Inklusi ?*  
18,4% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “guru yang memiliki latar belakang keilmuan PLB”.
  4. *Apakah anda mengetahui tentang kurikulum yang diterapkan di Sekolah Inklusi ? Ya / Tidak. Jika “Ya”, jelaskan tentang kurikulum yang diterapkan di Sekolah Inklusi !*  
Dari total 38 mahasiswa yang mengisi angket, hanya terdapat 5 orang yang menjawab “Ya”. Dari keseluruhan mahasiswa tidak ada satupun yang memberikan penjelasan.
  5. *Apa yang dimaksud dengan guru pendamping khusus ?*  
10,5% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “Guru yang bertugas mendampingi siswa ABK dalam kegiatan pembelajaran”.
  6. *Apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus ?*  
13,1% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “anak yang mengalami atau memiliki perkembangan yang berbeda baik dari segi fisik, mental dan emosional”.
  7. *Apa yang dimaksud dengan Ruang Sumber ?*  
7,8% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “ruangan sebagai tempat belajar ABK”
  8. *Apa yang dimaksud dengan Asesmen?*  
7,8% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “lembar pengamatan untuk mengetahui perkembangan anak”.
  9. *Menurut anda, apakah Sekolah Inklusi perlu melakukan Asesmen? Jika Ya, berikan alasan!*  
Dari total 38 mahasiswa, sejumlah 35 mahasiswa menjawab “Ya”. dari total 38

mahasiswa tidak ada satupun yang memberikan alasan.

10. *Apakah Sekolah Inklusi perlu bekerjasama dengan Psikolog, Psikiater, dan Dokter? Jika perlu, jelaskan alasannya !*

13,1% mahasiswa memiliki jawaban yang mendekati benar, adapun jawaban mahasiswa tersebut adalah “perlu, karena dalam menangani ABK perlu bekerjasama dengan psikolog, psikiater, dan dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat.

## PEMBAHASAN

Adapun pertanyaan pada angket yang diberikan kepada responden dibahas sebagai konsep dasar Pendidikan Inklusif berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (PKLK : 2011), sebagai berikut:

### 1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan salah satu model layanan pendidikan di dunia Pendidikan Luar Biasa. Banyak ahli PLB yang membuat definisi-definisi tentang pendidikan inklusif. Berikut penulis paparkan pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusi mempunyai pengertian yang

beragam. Salah satunya pengertian dari Nasichin (2001) yang menjelaskan Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama – sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum , dan pada akhirnya mereka bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif.

Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan , sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas inklusi merupakan kelas yang sesuai bagi anakl berkelainan apapun jenis kelainan dan bagaimanapun gradasinnya (Widyastono:2004).

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia yang lebih sesuai adalah model bahwa pendidikan inklusif sama dengan *mainstreaming*. Menurut Vaughn, Bos & Schun Penempatan anak berkelainan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model/bentuk sebagai berikut, Kelas reguler penuh (inklusi penuh). Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum

yang sama. Menurut Widyastono (2004) Penyelenggaraan pendidikan inklusi mempunyai landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris seperti di bawah ini.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika.

Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam individu anak normal pasti terdapat juga perbedaan tertentu. Karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Hal ini juga sebaiknya diterapkan dalam sistem pendidikan yang memungkinkan adanya pergaulan atau interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih dan silih asuh.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah deklarasi Salamanca oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan

semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Di Indonesia, penerapan inklusi dijamin undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasan pasal 15 antara lain menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus.

c. Landasan Pedagogis

Pasal 3 Undang-undang No 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

d. Landasan Empiris

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 1980-an. Penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *the National Academy of Science* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat, yang betul-betul dapat menentukan anak berkelainan yang tergolong berat.

## 2. Peserta Didik

Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan "normal" dan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus merupakan anak berkebutuhan khusus yaitu peserta didik yang memiliki kelainan atau perbedaan pada perkembangan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

## 3. Tenaga Pendidik

Terdapat 3 jenis tenaga pendidik di sekolah inklusi, antara lain:

- a. Guru kelas  
Guru kelas adalah pendidik/pengajar pada kelas tertentu di sekolah inklusi.
- b. Guru mata pelajaran  
Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.
- c. Guru pendamping khusus  
Guru pendamping khusus adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S1 Pendidikan Luar Biasa dan atau Kependidikan yang memiliki kompetensi pendidikan khusus dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus, intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

## 4. Asesmen

Asesmen adalah tindakan untuk menemukenali kondisi peserta didik, meliputi aspek: potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam

kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen juga dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen adalah:

- a. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus melakukan identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didiknya.
- b. Identifikasi dan asesmen harus dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan.
- c. Tim identifikasi dan asesmen satuan pendidikan sebaiknya melibatkan semua komponen sekolah (Kepala sekolah, Guru kelas, Guru BK, Guru Pendamping Khusus) dan sedapat mungkin dapat didukung oleh tenaga profesional lainnya sesuai kondisi sekolah (Dokter, Psikiater, Psikolog, Pekerja Sosial, terapis).

## 5. Kurikulum

Pada sistem pendidikan inklusif terdapat 3 jenis kurikulum yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yaitu Kurikulum Standar Nasional, Kurikulum Akomodatif Dibawah Standar Nasional, dan Kurikulum Akomodatif Diatas Standar Nasional.

Kurikulum akomodatif merupakan kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, potensi, kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Penerapan kurikulum akomodatif dapat memanfaatkan model penyelarasan kurikulum yang dilakukan dalam bentuk Eskalasi, Duplikasi, Modifikasi, Substitusi, dan Omisi.

## 6. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi dapat dilaksanakan dengan sistem pengelolaan Kelas Reguler Penuh, kelas Reguler dengan GPK, Kelas Khusus.

Kelas reguler penuh diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan peserta didik reguler. Di dalam kelas reguler penuh diterapkan kurikulum standar nasional yang berlaku bagi semua

peserta didik. Kelas reguler dengan GPK diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan peserta didik reguler menggunakan kurikulum standar nasional, namun peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh layanan khusus dari GPK.

Sedangkan kelas khusus diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus yang kegiatan belajarnya dipisahkan dengan peserta didik reguler. Di lingkup kelas khusus, disediakan Ruang Sumber yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang untuk ruang memberikan layanan akademik maupun layanan non akademik (kompensatoris) untuk peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas khusus.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pendidikan inklusif dapat ditarik sebuah simpulan terkait pengetahuan mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya tentang pendidikan inklusif. Pemaparan hasil analisis data yang didapatkan dari pengisian angket menunjukkan rata-rata prosentase yang rendah yaitu 9,6%. Berdasarkan nilai persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan

mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya tentang pendidikan inklusif masih sangat rendah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan wawasan mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. peningkatan wawasan mahasiswa dapat dilakukan melalui penambahan mata kuliah tentang pendidikan inklusif, seminar, maupun kegiatan-kegiatan lain. Hal ini menjadi sangat penting karena mahasiswa PG-PAUD UNIPA Surabaya merupakan calon tenaga pendidik yang menyongsong penerapan pendidikan inklusif di semua jenjang sekolah termasuk pendidikan anak usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S.(2006).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Asyar, M dan Nurtain, H.(1992).*Pengembangan & Inovasi Kurikulum*: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan
- Badudu, J. S. & Zaih, S. M. (2001). Kamus umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Berhanu, G. (2011). *Inclusive Education in Sweden: Responses, Challenges, and Prospects*.

- <http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/articles>  
(diakses 5 febuari 2012, 10.18)
- Budiyanto, dkk. (2009). *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Depdiknas. (2004). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/ Inklusi, Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas
- Marthan, L.K. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Mandar Maju.
- Mumpuniarti.(2001).*Modifikasi Kurikulum Dalam Model Pendidikan Inklusi*. JRR, th 11 No. 2. Desember 2001
- Nasichin.(2001).*Kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa*.Jurnal Rehabilitasi Dan Remedial. Jurnal Rehabilitasi Dan Remedial Tahun 11, No 2, Desember 2001
- PKLK. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Poerwadarmita, W. J. S. (1999). Kamus umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai pustaka.
- Salim, P. & Salim, Y. (2002). Kamus Bahasa Indonesia kontemporer. Jakarta : Modern english press.
- Sisdiknas. <http://www.sisdiknas.com/> diunduh tanggal 3 maret 2012, 09.15 wib
- Smith, D. J. (2006). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Nuansa: Bandung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata,N.S (2012).*Pengembangan Perangkat Kurikulum, Pembelajaran Dan Evaluasi Dalam Pendidikan Inklusi*. Surakarta
- Somadikarta, S. (1996). Buku informasi Universitas Indonesia. Depok : UI Press.
- Widyastono, H.(2004).*Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkelainan*.Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan.Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan No 046 Tahun Ke-10, Januari 2004.